

RESPON MASYARAKAT EKONOMI LEMAH TERHADAP PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN DI KABUPATEN PELALAWAN

Hidayat Syah

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau.

Abstract

Public Response to the Weak Economic Expansion of Opportunities for Eeducation Programs in the District of Pelelawan: *since a few decades ago, the district of pelelawan has sought to improve the quality of human resources through the expansion of opportunities for formal education in schools, ranging from basic education up to the secondary education, such as infrastructure development of schools, increased staff, procurement of school facilities and infrastructure, as well as low-cost education financing. Conclusions obtained from this research that the public has responded positively to the program. It is characterized by increasing enrollment of children of primary and secondary school age (7-18 years) in the formal education system in schools. However, the program still leaves a relatively large proportion, particularly among low-income communities. The result of this research indicates that the participation of low-income communities in the system of formal education is still not optimal, is not due to cultural values and their pessimistic attitude towards the role of education as a means of social mobility, but because of their inability to meet the necessities of life, so they are forced to ask for help from their children, so that family needs become lighter.*

Keywords: participation, education, society, low economic.

Pendahuluan

Tulisan ini semula adalah hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui respon masyarakat ekonomi lemah dalam

Hidayat Syah, Respon Masyarakat Ekonomi Lemah...

program perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, sebagai bagian dari program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa penduduk Kabupaten Pelalawan pada tahun 2008 berjumlah 253.308 jiwa dengan laju tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 4,00% pertahun, yang sebagian besar bertempat tinggal di desa (*rural society*) dan umumnya adalah petani. Hanya sebagian kecil yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), wiraswasta, jasa, pedagang, karyawan perusahaan, buruh, nelayan, dan sebagainya, dengan income perkapita sebesar Rp. 4.493.661 atau Rp. 12.311 perhari.¹ Angka tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Pelalawan masih terkategori relatif rendah.

Menyikapi kenyataan di atas, Pemerintah Kabupaten Pelalawan menyadari akan perlunya mencurahkan perhatian untuk memobilisasi status sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu wujud dari tanggung jawab pemerintah. Salah satu program yang gencar dilaksanakan sejak tahun 2002 adalah program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, melalui perluasan kesempatan memperoleh pendidikan formal di sekolah, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Program ini dilaksanakan oleh pemerintah melalui pembangunan sekolah baru, pengangkatan guru-guru melalui jalur regular, kontrak, dan honor daerah, penghapusan SPP (terutama tingkat SD), bantuan beasiswa, dan sebagainya.

¹ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pelalawan, tahun 2008.

Program ini ditempuh atas dasar asumsi bahwa pendidikan formal merupakan produser utama untuk meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui program ini diharapkan mampu memacu terciptanya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pendidikan adalah institusi yang mampu mengurangi kemiskinan, *agent* terdepan dalam mengarahkan perubahan ekonomi dan sosial, sarana pengembangan diri bagi individu, dan sebagai institusi yang dapat menumbuhkan kesadaran serta sikap patriotisme generasi muda².

Adalah suatu kenyataan bahwa dalam wilayah Kabupaten Pelalawan masih terdapat suatu proporsi yang cukup besar anak usia 7 sampai 18 tahun yang belum berpartisipasi dalam sistem pendidikan formal di sekolah dengan kadar yang memadai, dan sebagian di antara mereka tidak dapat menyelesaikan pendidikannya hingga ke tingkat SLTA, bahkan ada di antara anak-anak tersebut yang belum dapat menikmati pendidikan sekolah, terutama dari kalangan masyarakat berekonomi lemah. Meskipun anak-anak dari strata sosial ekonomi tersebut dapat *survive* dalam masyarakatnya, tetapi mereka tetap dipandang masyarakat sebagai warga pinggiran atau marjinal.

Berangkat dari dasar pemikiran dan realitas empiris sebagaimana dikemukakan di atas, tulisan ini mengetengahkan temuan penelitian tentang respon masyarakat berekonomi lemah terhadap program perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anaknya serta faktor-faktor yang menyebabkan anak dari keluarga berekonomi lemah kurang mampu bertahan di sekolah, yaitu apakah faktor-faktor tersebut lebih didominasi oleh karena ketidakmampuan ekonomi

² Albach, *Comparative Education* (New York: Macmillan Publishing Co. Inc., 1982), hlm. 81

keluarga, persepsi orang tua terhadap nilai pendidikan, budaya masyarakat, atau karena faktor-faktor lain.

Dasar Teoritis

Program perluasan kesempatan memperoleh pendidikan merupakan program investasi modal manusia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebuah program pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan yang hasilnya tidak segera dapat dilihat. Pendekatan investasi modal manusia (*human capital investment*) yang diterapkan oleh beberapa negara di dunia, terutama di negara-negara berkembang, didasari oleh asumsi bahwa kelompok-kelompok masyarakat ekonomi lemah (miskin), tidak mampu bersaing dalam merebut peluang yang ada dikarenakan keterbatasan kualitas sumber daya manusianya. Kararena itu, investasi modal manusia melalui penyediaan dana yang cukup besar di bidang pendidikan, memberi kesempatan kepada semua warga negara, terutama pada anak-anak dari keluarga ekonomi lemah, untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, agar mereka memiliki daya saing yang kompetitif. Karena, bagaimana pun juga, investasi di bidang pendidikan berhubungan erat dengan perencanaan ekonomi, penyediaan sumber daya manusia, dan perencanaan pendidikan. Program ini memberi acuan pada pendekatan ekonomi pendidikan, ekonomi diskriminasi, ekonomi kemiskinan, serta ukuran keluarga yang direncanakan, ke dalam suatu bagian penerapan ekonomi makro³.

Freeman, sebagaimana dikutip oleh Ali, memandang pendidikan sebagai investasi modal manusia (*human capital investment*) yang akan

³ *Ibid.*, hlm. 82

memberi keuntungan dari pendapatan yang dihasilkan melalui partisipasinya dalam pasar kerja. Hal itu dimungkinkan karena setiap orang berbeda keefektifannya dalam melaksanakan pekerjaan. Tenaga kerja yang efektif memiliki produktivitas yang tinggi dan akan menyebabkan peningkatan keluaran (*output*) pekerjaan. Tenaga kerja demikian merupakan produk pendidikan.⁴ Oleh karena itu, pendidikan merupakan anak tangga mobilitas yang penting. Bahkan jenis pekerjaan kasar yang berpenghasilan baik pun sukar diperoleh, kecuali jika seseorang mampu membaca petunjuk dan mengerjakan perhitungan yang sederhana. Ini berarti makin tinggi taraf pendidikan makin besar kemungkinan bagi anak-anak dari kelompok masyarakat kelas bawah dan menengah untuk memobilisasi diri ke tingkat yang lebih tinggi.⁵

Menurut hasil penelitian Farell, seperti dikutip oleh Albach, sudah menjadi gejala umum bahwa dalam sistem pendidikan sekolah, anak dari lingkungan keluarga miskin kurang bisa bertahan di sekolah dibandingkan anak dari keluarga mampu, demikian juga anak desa kalah bersaing dibanding anak kota. Namun demikian, Heyneman, seperti dikutip oleh Albach, meragukan hasil penelitian tersebut. Bagi Heyneman, latar belakang social apapun selalu berkaitan dengan sikap (*attitude*), baik berupa ambisi, konsep diri, pusat control, dan hasrat akan pendidikan, yakni; suka atau tidak suka pada pendidikan. Namun, ia tetap mengakui bahwa anak dengan latar belakang social yang lebih baik, cenderung untuk tampil lebih baik.⁶

⁴ Muhammad Ali, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional*, (Bandung: Imperial Bhakti Utama, 2009), hlm. 188.

⁵ Ravik Karsidi, *Sosiologi Pendidikan*, (Surakarta: UNS Press, 2007), hlm. 184.

⁶ Albach, *Comparative . . .*, hlm. 85.

Memperhatikan masalah perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, mau atau tidak mau, harus memandang sekolah sebagai suatu proses jangka panjang, di mana anak-anak dapat dipilah dengan cara yang berbeda. Mengingat sekolah menggunakan mekanisme penyeleksian yang efektif, mempertinggi dan meratifikasi status, maka persamaan kesempatan memperoleh pendidikan, menurut Farell, dalam Albach (1982), mempunyai arti yang multimakna. Pertama, kesamaan kesempatan menikmati pendidikan, yaitu kemungkinan anak-anak dari kelompok social yang berbeda dapat masuk ke dalam sistem pendidikan sekolah; Kedua, kesamaan kesempatann untuk bertahan dalam sistem pendidikan sekolah, yaitu kemungkinan anak-anak dari kelompok social yang berbeda dapat bertahan sampai tamat pada jenjang tertentu (pendidikan dasar, menengah, dan tinggi), dan; Ketiga, kesamaan kelulusan dan persamaan pendapatan setelah selesai mengikuti pendidikan sekolah.⁷

Dari apa yang dikemukakan di atas maka masalah kesamaan kesempatan dalam sistem pendidikan sekolah adalah masalah kesempatan memasuki sekolah dasar, kemudian masalah seberapa besar jumlah anak yang dapat bertahan di sekolah sampai ia menamatkan pendidikannya. Apabila seluruh anak telah tertampung pada Sekolah Dasar dan dapat bertahan sampai tamat, maka persoalan berikutnya adalah masalah kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah. Demikianlah seterusnya, hingga ke pendidikan tinggi.

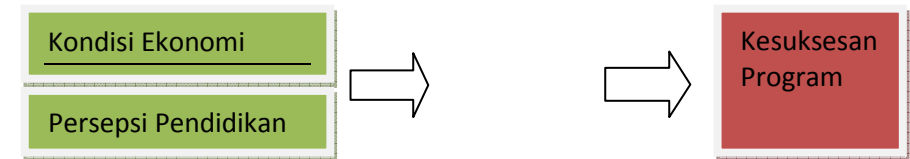
Masalah kesamaan kesempatan memperoleh pendidikan sekolah di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi problem, terutama disebabkan oleh keterbatasan sumber, baik dana

⁷ *Ibid.*, *Comparaitive . . .*, hlm. 81

maupun sumber-sumber fisik dan sumber daya lainnya. Kemudian kondisi geografis dengan pola permukiman yang terpencil dan jarang penduduknya, lingkungan alam yang tidak kondusif dan sarana transportasi dan komunikasi yang minim, sehingga pembangunan sekolah, penyampaian buku-buku dan alat-alat sekolah, serta penyediaan tenaga pengajar yang kualified memerlukan biaya tinggi, sehingga sulit untuk terpenuhi. Kita dapat disimpulkan bahwa Berangkat dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesuksesan program perluasan kesempatan memperoleh pendidikan sangat ditentukan oleh persepsi orang tua dan anak tentang peran dan fungsi pendidikan dan pada kemampuan ekonomi keluarga anak yang bersangkutan. Kedua faktor (persepsi dan kondisi ekonomi) tersebut merupakan variable determinan yang menentukan keberhasilan program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan kesempatan memperoleh pendidikan.

Faktor persepsi dan kondisi ekonomi keluarga dipandang penting, karena persepsi yang positif tentang fungsi, peran dan nilai pendidikan, sebagai mata rantai yang jelas bagi prestise pekerjaan, serta didukung pula oleh kondisi ekonomi yang baik, mendorong munculnya respon yang positif pula dari masyarakat, berupa dorongan dan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan putera dan puterinya.

Hubungan antara faktor kondisi ekonomi dan persepsi dengan respon masyarakat terhadap program perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, secara skematis-hipotetis dapat diformulasikan sebagai berikut;



Temuan Penelitian

1. Partisipasi dalam Pendidikan

Penelitian tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam program perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berbentuk *explanatory research* ini dalam pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dan data dokumentasi, sedangkan unit analisisnya adalah keluarga yang terdiri yang terkategori berekonomi lemah atau kurang mampu yang diambil dengan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan kondisi pemukiman masyarakat yang terdiri dari perkotaan, pinggiran kota (*suburb*), pusat kecamatan dan pedesaan.

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Pelalawan, sejak beberapa tahun terakhir, telah menunjukkan perkembangan yang menggemblirakan. Bukan hanya dari sisi jumlah fisik sekolah, tapi juga dari segi tingkat partisipasi masyarakat tiap tahunnya pada semua tingkat pendidikan, seperti tabel 1.

Tabel 1
Pertumbuhan Jumlah Sekolah dan Siswa Tingkat Dasar, SLTP dan SLTA di Kabupaten Pelalawan tahun 2006/2007 s/d 2008/2009

No	Tingkat Pendidikan	Tahun Pelajaran					
		2006/2007		2007/2008		2008/2009	
		Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa
1	Dasar	191	36.797	200	37.922	255	38.730

2	SLTP	30	8.131	43	9.145	67	9.497
3	SLTA	15	4.232	16	4.681	41	5.472
	Jumlah	236	49.160	259	51.748	313	53.699

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, Pendidikan Dalam Angka, 2009 setelah diolah kembali.

Tabel 1 menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan jumlah anak yang berpartisipasi dalam pendidikan seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah sekolah yang cukup pesat. Namun, belum mengalami peningkatan yang optimal, karena belum semua berpartisipasi dalam pendidikan. Hal itu terbukti dengan data statistik yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Pelalawan seperti tabel 2.

Tabel 2

Jumlah Anak usia 7 s.d 18 tahun yang Berparticipisasi Dalam Pendidikan Sekolah di Kabupaten Pelalawan Tahun Pelajaran 2006/2007 s.d 2008/2009

No	Usia	Tahun Pelajaran					
		2006/2007		2007/2008		2008/2009	
		Sekolah	Tidak sekolah	Sekolah	Tidak Sekolah	Sekolah	Tidak sekolah
1	7-12	36.797	2.395	37.922	3.311	38.730	3.796
2	13-15	8.131	7.906	9.145	7.916	9.497	7.713
3	16-18	4.232	4.273	4.681	7.430	6.536	5.808
	Jumlah	49.160	14.573	51.748	18.657	54.773	17.317

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, Pendidikan Dalam Angka, 2009 setelah diolah kembali.

2. Kemampuan Bertahan di Sekolah
 - a. Tingkat Sekolah Dasar

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan anak bertahan di sekolah tingkat dasar (SD dan MI) masih rentan. Hal itu ditunjukkan oleh data tentang jumlah siswa yang drop out pada setiap tahun, seperti ditunjukkan tabel 3.

Tabel 3

Jumlah Drop Out Siswa Tingkat Dasardi Kabupaten Pelalawan Tahun ajaran 2006/2007 s.d 2008/2009

No	Kelas	Tahun Pelajaran						
		2005/2006	2006/2007		2007/2008		2008/2009	
		Sekolah	Sekolah	Drop Out	Sekolah	Drop Out	Sekolah	Drop Out
1	I	6.923	7.257	-	7.363	-	8.549	-
2	II	6.620	6.851	72	6.556	701	6.536	757
3	III	6.274	6.511	119	6.475	376	6.475	81
4	IV	5.721	5.974	300	6.262	249	6.376	99
5	V	4.825	5.324	397	5.225	699	5.721	505
6	VI	4.620	4.580	245	4.498	826	5.052	173
	Jumlah	34.983	36.497	1.133	36.522	2.831	38.730	1.615

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, Pendidikan Dalam Angka,

Tabel 3 menjelaskan bahwa dari 34.978 orang siswa yang terdaftar di sekolah dasar pada tahun 2005/2006, ketika naik kelas pada tahun 2006/2007 terdapat 1.133 orang yang drop out. Kemudian pada tahun ajaran 2007/2008, yaitu ketika naik ke kelas berikutnya, terdapat pula 2.831 anak yang drop out, dan pada tahun berikutnya, yakni tahun 2008/2009, siswa yang drop out berjumlah 1.615 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa

pada setiap tahun ajaran terjadi angka dropout yang cukup besar, meskipun bersifat fluktuatif.

b. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan melaporkan bahwa sejak tahun 2006 hingga 2008, telah terjadi pertumbuhan jumlah sekolah dan siswa tingkat SLTP yang cukup signifikan, namun tetap terjadi angka drop out yang relatif tinggi, seperti dijelaskan pada tabel 4.

Tabel 4
Jumlah Drop Out Siswa Tingkat SLTP di Kabupaten Pelalawan Tahun Ajaran 2006/2007 s.d 2008/2009

No	Kelas	Tahun Pelajaran							
		2005/2006		2006/2007		2007/2008		2008/2009	
		Sekolah	Sekolah	Drop Out	Sekolah	Drop out	Sekolah	Drop Out	
1	I	3.027	3.371	-	3.427	-	3.545	-	
2	II	1.930	2.900	127	3.095	276	3.119	308	
3	III	1.876	1.860	70	2.623	277	2.833	262	
	Jumlah	6.833	8.131	197	9.145	553	9.497	570	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, Pendidikan Dalam Angka, 2009 setelah diolah kembali.

Berdasarkan data pada table 4 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah siswa SLTP yang tidak mampu bertahan di sekolah juga relative cukup besar. Dari 6.833 orang siswa yang terdaftar pada tahun 2005/2006, ketika mereka naik kelas pada tahun 2006/2007 terdapat 197 orang siswa yang drop out. Jumlah siswa yang drop out tersebut terus meningkat seiring dengan meningkatnya kelas mereka, dan

jumlah tersebut cukup besar. Pada tahun 2007/2008 terdapat 553 orang siswa yang drop out, dan pada tahun 2008/2009 meningkat lagi menjadi 570 orang siswa.

Besarnya jumlah siswa SLTP yang tidak mampu bertahan di sekolah dan meningkatnya angka drop out tiap tahun diperkirakan ada hubungannya dengan kondisi social ekonomi masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi lemah, karena semakin besar anak mereka, makin hari-hari. yang dipergunakan untuk membantu orang tua bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

c. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa pada tingkat SLTA juga terjadi angka putus sekolah (drop out) sebagaimana yang terjadi pada tingkat dasar dan SLTP. siswa yang terdaftar pada tahun 2005/2006, ketika mereka naik kelas pada tahun berikutnya, yakni 2006/2007 terdapat 446 siswa yang drop out. Begitu juga pada kenaikan kelas tahun 2007/2008, dan 2008/2009, terjadi drop out dengan jumlah yang cukup besar, seperti tertera pada table 5.

Tabel 5
Jumlah Drop Out Siswa Tingkat SLTA di Kabupaten Pelalawan Tahun Ajaran 2006/2007 s.d 2008/2009

No	Kelas	Tahun Pelajaran							
		2005/2006		2006/2007		2007/2008		2008/2009	
		Sekolah	Sekolah	Drop Out	Sekolah	Drop out	Sekolah	Drop Out	
1	I	1.578	1.820	-	1.806	-	2.026	-	
2	II	1.270	1.450	128	1.633	182	1.710	196	

3	III	943	962	318	1.242	208	1.536	97
	Jumlah	3.791	4.232	446	4.681	390	5.472	293

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, Pendidikan Dalam Angka, 2009 setelah diolah kembali.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi dan Daya Tahan Siswa di Sekolah

Dari data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 680 orang responden berekonomi lemah terdapat 186 responden yang mempunyai anak usia Sekolah Dasar (7 – 12 tahun) yang sudah tidak sekolah lagi. Dari 186 responden tersebut diperoleh jawaban yang variatif, selain karena kondisi objektif ekonomi keluarga yang terkategori rendah atau lemah, pemukiman penduduk yang tersebar dalam kelompok-kelompok kecil, keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, juga ada hubungannya dengan nilai budaya yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap nilai pendidikan bagi anak dan nilai anak bagi keluarga.

Dari 186 responden tersebut terdapat 87 orang (46,77%) responden yang menyatakan bahwa faktor utama yang menjadi kendala adalah letak sekolah yang relative jauh dari pemukiman penduduk, 65 orang (34,95%) responden menjawab karena keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, 22 orang (11,83%) responden menjawab karena belum ada sekolah di dilingkungan (pemukiman) mereka, hanya 12 orang (6,45%) responden yang menyatakan karena ketidak mampuan ekonomi keluarga untuk membiaya pendidikan anak. Sebuah jumlah yang cukup kecil, dan tidak ada responden yang mempersepsi pendidikan sebagai sesuatu yang kurang penting bagi anak.

Jawaban responden di atas merupakan konsekuensi dari kondisi dan letak geografis pemukiman penduduk yang terpencar dan

berupa perkampungan-perkampungan kecil dengan jumlah penduduk yang relative kecil. Meskipun di desa mereka sudah ada Sekolah Dasar, tetapi sekolah-sekolah itu umumnya berada di pusat desa. Kondisi perkampungan yang terpencar dan keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, merupakan realitas objektif yang dihadapi masyarakat, dimana satu-satunya sarana transportasi yang ada adalah transportasi air berupa perahu kecil dan membahayakan bagi keselamatan jiwa anak dalam perjalanannya menuju sekolah yang ada di pusat desa. Untuk membangun sekolah di pemukiman penduduk yang relative kecil adalah tidak mungkin, karena selain keterbatasan jumlah guru yang ada, juga dipandang sebagai suatu pemborosan dan menjadikan pendidikan berbiaya tinggi (inefisienasi). Kondisi objektif ini sejalan dengan apa yang dekemukakan dimuka.

Berbeda dengan responden yang mempunyai anak usia 7 – 12 tahun, responden yang mempunyai anak usia 13 sampai dengan 18 tahun yang anaknya tidak sekolah lagi yang jumlahnya sebanyak 494 orang. Dari jumlah tersebut diperoleh jawaban 42.50% di antara mereka menyatakan karena ketidakmampuan ekonomi. Sementara 15% berpendapat bahwa pendidikan anak sudah memadai apabila anak telah menamatkan pendidikannya di Sekolah Dasar dan telah mampu membaca, menulis dan berhitung (calistung) dengan baik. Sedangkan orang tua yang menyatakan nada psimis terhadap peran pendidikan sebagai sarana untuk meraih kesuksesan di masa depan, mencapai angka 12,50% %. Menurut mereka ini, anak tidak perlu sekolah tinggi, karena sekolah tinggipun belum tentu mendapatkan pekerjaan yang baik, selain karena sulit mencari pekerjaan, juga persaingan yang semakin ketat. Daripada menghabiskan biaya, lebih baik anak membantu orang tua bekerja. Sedangkan yang menjawab bahwa anak mereka tidak sekolah karena memang anak itu sendiri

yang sudah tidak mau sekolah, mencapai angka 13,75%. Semnetara orang tua yang menyatakan bahwa anaknya tidak sekolah disebabkan karena anaknya menikah sebelum menamatkan pendidikan mencapai angka 7,50%, dan yang anaknya dikeluarkan dari sekolah karena sesuatu sebab sehingga mereka enggen melanjutkan pendidikannya kembali mencapai angka 8,75%.

Mengenai nilai pendidikan bagi anak terdapat 79,37% atau 381 dari 460 responden menyatakan bahwa pendidikan itu penting, sementara 20,63% responden menampakkan jawaban yang psimistis dan berpersepsi negative terhadap nilai pendidikan bagi anak. Meskipun terdapat 79,37% responden yang menyatakan pentingnya nilai pendidikan bagi anak, namun alasan yang mereka kemukakan bervariasi, 30,77% dengan alasan agar masa depan anak menjadi lebih baik, 21,98% menyatakan agar anak menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, 19,78% agar anak tidak menjadi bodoh. Sedangkan yang lain (27,47%) menyatakan bahwa pemberian pendidikan bagi anak agar anak tersebut dapat membantu orang tua setelah mereka menyelesaikan pendidikannya.

Jawaban responden di atas sejalan dengan nilai budaya yang menjadi pandangan hidup mereka di mana 28,07% di antaranya menyatakan bahwa masa depan manusia, manusia itu sendirilah yang menentukannya melalui usaha dan kerjanya. Sedangkan yang menyatakan bahwa manusia meskipun tidak dapat menentukan masa depannya, tapi manusia dapat berusaha, karena takdir Tuhan juga dapat berubah, mencapai angka 50.00%. Sedangkan sisanya, yakni 21,93% responden menyatakan bahwa masa depan manusia sudah ditakdirkan Tuhan, dan tidak mungkin berubah. Jika Tuhan menghendaki seseorang hidup sejahtera, maka kesejahteraan itu pasti

tercapai. Sebaliknya, bagaimanapun usaha manusia, usaha itu tidak memberi efek sama sekali.

Analisis Pembahasan

Sesungguhnya program peluasan kesempatan memperoleh pendidikan merupakan program investasi modal manusia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). sebuah program pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan yang hasilnya tidak segera dapat dilihat. Pendekatan investasi modal manusia yang diterapkan oleh beberapa negara di dunia, terutama di negara-negara sedang membangun (berkembang) didasari oleh asumsi bahwa kelompok-kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu di bidang ekononomi tidak dapat bersaing dalam merebut peluang yang ada, dikarenakan keterbatasan kualitas sumber daya manusianya. Karena itu investasi modal manusia melalui penyediaan dana yang cukup besar di bidang pendidikan memberi kesempatan kepada semua warga negara, terutama pada anak-anak dari keluarga ekononomi lemah untuk dapat berpartisipasi dalam pendidikan, guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar mereka memiliki daya saing yang kompetitif. Karena bagaimana pun juga investasi di bidang pendidikan berhubungan erat dengan perencanaan ekonomi, penyediaan sumber daya manusia, dan perencanaan pendidikan. Program ini memberi acuan pada pendekatan ekonomi pendidikan, ekonomi diskriminasi, ekonomi kemiskinan, serta ukuran keluarga yang direncanakan ke dalam suatu bagian penerapan ekonomi makro.

Memperhatikan masalah perluasan kesempatan memperoleh pendidikan mau tidak mau harus melihat sekolah sebagai suatu proses jangka panjang di mana anak-anak usia 7 sampai dengan 18 tahun dapat dipilah-pilah dengan cara yang berbeda. Mengingat sekolah

menggunakan mekanisme penyeleksian yang efektif, mempertinggi dan meratifikasi status, maka persamaan kesempatan memperoleh pendidikan mempunyai arti yang multimakna. Persamaan kesempatan tersebut dapat berarti kesamaan kesempatan menikmati pendidikan, kesamaan kesempatan untuk dapat bertahan dalam sistem pendidikan, kesamaan kelulusan, dan persamaan pendapatan setelah selesai mengikuti pendidikan sekolah.

Menurut Joseph P. Farell dalam Philip G. Altbach (1982; 81) persamaan kesempatan menikmati pendidikan adalah kemungkinan bagi anak-anak dari kelompok sosial yang berbeda-beda dapat masuk ke dalam sistem pendidikan sekolah. Bagi sebagian besar anak-anak di negara-negara berkembang, masalah kesamaan kesempatan memperoleh pendidikan sekolah menghadapi problem, dan yang paling utama adalah kurangnya sumber daya, baik dana maupun sumber-sumber fisik dan sumber daya manusia. Kemudian keadaan geografis dengan pola pemukiman yang terpencil dan jarang penduduknya, lingkungan alam yang keras, minimnya sarana transportasi dan komunikasi yang menyebabkan pembangunan sekolah, penyampaian buku-buku dan alat-alat sekolah, serta penyediaan tenaga pengajar yang kualified sulit terpenuhi dan membutuhkan biaya tinggi.⁸

Sesungguhnya telah menjadi fenomena umum bahwa dalam sistem pendidikan sekolah, menurut Joseph P. Farell seperti dikutip oleh Altbach, bahwa anak dari lingkungan miskin kurang bisa bertahan dibandingkan anak dari keluarga mampu, anak desa dibandingkan anak kota, dan anak perempuan dibandingkan anak laki-

⁸ Altbach, *Comparative Education*, (New York; Macmillan Publishing Co, Inc. 1982), hlm. 81.

laki. Dengan demikian, problem ketidaksamaan dalam sistem pendidikan sekolah pertama-tama adalah masalah kesempatan untuk memasuki sekolah dasar, kemudian masalah seberapa besar jumlah anak dapat bertahan di sekolah sampai ia tamat. Apabila seluruh anak sudah dapat ditampung di sekolah dasar dan dapat bertahan sampai tamat, maka persoalan berikutnya adalah masalah kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah. Demikian seterusnya hingga ke perguruan tinggi.⁹

Berkaitan dengan apa yang dikemukakan di atas, maka untuk melahirkan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang berkualitas dan yang akan meraih upah atau penghasilan yang lebih tinggi, memerlukan modal yang cukup besar pula. Oleh karena itu penurunan biaya pendidikan melalui pemberian subsidi terutama kepada kelompok masyarakat tidak mampu, bahkan mungkin membebaskannya sama sekali dari segala pembiayaan pendidikan, merupakan program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Meskipun alokasi dana yang cukup besar bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berpengaruh positif terutama bagi anak-anak dari keluarga dengan latar belakang status sosial ekonomi kurang mampu, tetapi hal itu tidak berarti masalah kesamaan kesempatan memperoleh pendidikan dapat teratasi secara tuntas, bahkan mungkin dapat memperburuk problem ketidaksamaan kesempatan tersebut.

Kenyataan menunjukkan, bahwa meskipun kegiatan pendidikan di Indonesia sudah berlangsung lama, namun belum berhasil menyediakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan mampu berkompetisi dalam persaingan global, karena sektor pendidikan selama ini belum pernah ditempatkan sebagai prioritas pembangunan,

⁹ *Ibid*, hlm. 83

kecuali sejak beberapa tahun terakhir. Akibatnya, mutu pendidikan Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain di dunia, bahkan di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, Philipina, dan Thailand.

Rendahnya kualitas SDM Indonesia tidak terlepas dari realitas masih banyak anak-anak usia sekolah, terutama di pedesaan, yang belum berpartisipasi dalam pendidikan formal pada tingkat dasar dan masih banyak di antara mereka yang putus sekolah. Hal yang sama juga terjadi pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA. Penyebab utamanya adalah masalah kemiskinan dan ketidakmampuan orang tua menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sehubungan dengan rendahnya kualitas SDM tersebut, *United Nations* (PBB) sebagaimana dikutip oleh Anshori (2000) mengemukakan beberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan Indonesia, yaitu: 1), pada masa usia muda anak-anak telah menjadi tenaga kerja keluarga atau bekerja pada orang lain; 2), waktu musim panen, terutama penduduk di pedesaan, anak-anak bekerja menjam kerja normal; 3), umumnya anak-anak, terutama yang tinggal di desa, menganggur pada masa pascapanen; 4), untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, anak-anak tersebut harus bekerja mencari upah; 5), mereka menikah pada usia muda; 6), anak-anak tersebut kurang suka berinteraksi dengan teman sebaya yang berpendidikan; 7), merasa takut terhadap situasi belajar mengajar yang sifatnya formal; 8), mereka meninggalkan desa untuk menghindari kerja pertanian, dan; 9), mereka dihadapkan pada lahan pertanian yang sempit yang mereka anggap akan membuat mereka tetap miskin.

Sesungguhnya, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk memberi kesempatan yang sama pada semua

warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam pendidikan tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa pemerintah tidak hanya berkewajiban menciptakan kesempatan yang luas untuk mendapatkan pendidikan bagi rakyatnya, juga berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerataan pembangunan pendidikan. Tetapi, dalam hal ini pemerintah menghadapi berbagai kendala, di antaranya adalah kondisi geografis yang sulit dijangkau, pemukiman penduduk yang terpencar, belum memadainya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, dan keterbatasan dana yang dapat dialokasikan untuk pendidikan.

Sesungguhnya pendidikan tidak hanya dapat dipandang sebagai sumber nilai pokok bagi perkembangan masyarakat, ia juga mempunyai peran dalam memberikan sumbangan terhadap berbagai perkembangan yang lain, terutama dalam kaitannya dengan individu dan masyarakat. Melalui program perluasan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pendidikan bagi seluruh warga masyarakat dari berbagai strata atau lapisan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, sehingga dengan kemampuan sendiri masyarakat dapat mengentaskan dirinya dari kebodohan dan ketidakmampuan, dan mampu hidup mandiri dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Mereka tidak lagi hidup dalam ketertinggalan, karena ketertinggalan sesungguhnya merupakan konsekuensi dari rendahnya tingkat produktivitas ekonomi, dan ini berpangkal pada rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia.

Munculnya asumsi bahwa pendidikan mempengaruhi kesuksesan ekonomi bukanlah suatu hal yang tidak berdasar, karena; 1), sebagian besar lini pekerjaan membutuhkan tenaga kerja berlatar belakang pendidikan formal; 2), pemerintah membutuhkan tenaga kerja terdidik untuk dapat mengoperasikan skill dan keahliannya dalam rangka industrialisasi dan modernisasi pembangunan nasional; 3), lembaga

sekolah menyediakan serangkaian proses pengajaran yang mampu membekali para peserta didik dengan perangkat kemampuan yang dibutuhkan oleh lahan pekerjaan di era moderen, dan; 5), sebuah ekspektasi sosial juga menggejala pada salah satu asumsi bahwa melalui penempatan skill secara berkesinambungan dalam sebuah organisasi yang mapan, para lulusan lembaga pendidikan akan memiliki keutuhan sikap, kemampuan dan keperibadian yang progresif, kreatif dan memiliki kecermatan tinggi untuk menangkap potensi ekonomi dalam setiap kondisi maupun situasi, sehingga dari otak dan tangan-tangan mereka muncul lahan-lahan penghidupan baru yang mampu menjamin kesejahteraan manusia.

Sesungguhnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan kesempatan berpartisipasi dalam pendidikan merupakan solusi yang cukup efektif, karena pendidikan, menurut John C. Bock, merupakan institusi yang sangat potensial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan memberikan semacam *contest mobility sistem*, di mana semua anak dari semua level status sosial memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan prestasi (Albatbach, 1982; 85). Dengan demikian pendidikan tetap menjadi determinan bagi usaha-usaha pembangunan, karena pendidikan mempunyai pengaruh dalam mensosialisasikan generasi muda untuk memperluas pengetahuan dan kecakapan sebagai hal yang esensial, mampu meningkatkan taraf keterampilan untuk berpartisipasi dalam masyarakat, dan secara keseluruhan generasi muda yang terdidik akan memberikan suatu peningkatan kualitatif bagi masyarakat.

Menurut Altbach (1982;16), pendidikan sangat erat kaitannya dengan sistem mobilitas sosial, karena pendidikan selain merupakan teori dan metode pengembangan diri dari berbagai potensi

masyarakat, juga memberikan sertifikasi atau surat tanda tamat belajar (STTB) sebagai legitimasi untuk dapat berkompetisi di lapangan kerja. Sementara itu, realitas menunjukkan, terutama di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia, segmentasi pemisahan antara kelompok pasaran kerja primer (manajerial dan profesional) dengan kelompok kerja skunder (karyawan dan petani), bukan masalah kecakapan atau kompetisi, melainkan serifikasi hasil pendidikan tertentu. Oleh karena itulah maka pengelompokan sosial dalam masyarakat banyak ditentukan oleh jenis sertifikasi pendidikan yang diperoleh.

Pada dasarnya, pendidikan dapat meneruskan atau menumbuhkan makna-makna sosial baru, posisi sosial baru, dan mengubah corak hubungan status antar anggota masyarakat, karena pendidikan dapat menciptakan kelas-kelas sosial baru dan ketegori-kategori baru terhadap tiap personal yang patut menduduki kelas-kelas itu. Namun demikian perluasan kesempatan memperoleh pendidikan tidak otomatis dapat mengangkat posisi seseorang, karena masalahnya tidak hanya terletak pada kesempatan untuk memasuki suatu jenjang pendidikan, tapi juga berkaitan dengan kemampuan bertahan di sekolah dan prestasi belajar yang mereka capai.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Joseph P. Farell didapatkan informasi bahwa sudah menjadi gejala umum bahwa dalam sistem pendidikan, anak-anak dari lingkungan keluarga miskin kurang bisa bertahan di sekolah dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga mampu. Demikian juga anak desa kalah bersaing dibandingkan dengan anak kota. Namun demikian, Heyneman (1979) masih meragukan hasil penelitian Joseph P. Farell tersebut, karena menurut Heyneman, latar belakang sosial apa pun selalu berkaitan dengan sikap (*attitude*) baik berupa ambisi, konsep diri, pusat kontrol, dan hasrat akan

pendidikan, yakni; suka atau tidak suka pada pendidikan, tetapi ia tetap mengakui bahwa umumnya anak dari latar belakang sosial yang lebih baik cenderung untuk tampil lebih baik. Dengan demikian, kemampuan pemerintah menciptakan suatu sikap yang positif secara merata terhadap pendidikan pada semua strata sosial, dapat mengurangi atau memperkecil pengaruh perbedaan latar belakang sosial.

Kemampuan anak bertahan di sekolah banyak kaitannya dengan tingkat prestasi belajar yang mereka capai, dan ini terkait erat dengan kemampuan ekonomi keluarga untuk menyediakan peralatan belajar bagi anak-anaknya. Moegiadi dalam sebuah penelitiannya di tahun 1979 menemukan bahwa ada hubungan yang cukup signifikan antara status ekonomi keluarga dengan prestasi belajar anak di sekolah, di mana kemiskinan dapat menyebabkan prestasi belajar anak menjadi rendah, dan anak-anak mereka tidak mampu bersaing dengan anak-anak dari keluarga mampu, yang selanjutnya anak dari keluarga miskin tidak akan mampu untuk naik kelas. Dalam situasi seperti ini mereka terpaksa menghadapi pilihan antara mengulang kelas atau keluar dari sekolah.

Seperti dikemukakan oleh Joseph P. Farrell di atas, bahwa terdapat kesenjangan prestasi belajar antara anak-anak desa dengan anak-anak di kota, terutama di kota-kota besar. Anak-anak kota selalu menjadi peraih prestasi yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak dari desa. Hal itu menurut Joseph bukan karena tingkat kemampuan intelegensi anak kota yang tinggi, melainkan karena sebagian besar sekolah-sekolah di kota dilengkapi tidak saja dengan perlengkapan sekolah tapi juga tersedia perpustakaan, buku-buku teks serta guru-guru yang kaulified, sementara hal itu sangat sulit bahkan mungkin mustahil untuk didapatkan di desa.

Sesungguhnya banyak faktor yang menyebabkan anak tidak dapat menikmati pendidikan. Di antara faktor itu adalah; 1), kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih tergolong rendah sehingga mereka tidak mampu membiaya pendidikan anak-anaknya dan menjadikan anak sebagai salah satu sumber tenaga kerja untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan hidup; 2), faktor budaya masyarakat yang belum memberikan apresiasi positif terhadap urgensi pendidikan bagi generasi muda, seperti pandangan bahwa pendidikan anak sudah dipandang memadai apabila anak telah mampu menulis dan membaca dengan baik, terutama terhadap anak perempuan, sehingga mereka tidak perlu melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. 3), kondisi geografis wilayah dan pemukiman penduduk dalam bentuk perkampungan-perkampungan kecil dengan jumlah penduduk yang relative sedikit dan tidak terpusat pada suatu lokasi tertentu. Kondisi geografis dan pemukiman penduduk yang demikian menjadikan pendidikan berbiaya tinggi, karena rasio jumlah anak, lokal, dan guru tidak seimbang, dan; 4), terbatasnya sarana dan prasarana transportasi merupakan faktor lain yang tidak hanya menjadi kendala tapi juga melemahkan minat anak untuk terus bertahan di sekolah.

Apa yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa program perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi generasi muda oleh pemerintah merupakan bagian dari program makro peningkatan kualitas SDM. Program tersebut bertujuan agar mereka dapat berpartisipasi secara mandiri untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Namun, kesuksesan program ini sangat tergantung pada persepsi orang tua dan anak terhadap peran dan fungsi pendidikan dan pada kemampuan ekonomi keluarga anak yang bersangkutan. Kedua faktor (persepsi dan kemampuan ekonomi keluarga) tersebut merupakan

variabel determinan yang menentukan keberhasilan program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program perluasan memperoleh pendidikan.

Faktor persepsi dan kemampuan ekonomi keluarga dipandang penting karena dengan kemampuan ekonomi dan persepsi yang positif bahwa pendidikan menjadi mata rantai yang jelas bagi prestise pekerjaan bagi generasi muda, akan mendorong munculnya respon yang positif pula, berupa dorongan dan tanggung jawab orang tua terhadap putera-puterinya untuk terus bertahan di sekolah dan meneruskan pendidikan, dan orang tua belum mengharapkan atau belum memberi peran kepada putera-puterinya untuk bekerja membantu mereka mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga. Sebaliknya, apabila keluarga memandang bahwa sekolah tidak dapat berbuat dan tidak memberikan nilai tambah apapun pada mereka, meskipun mereka termasuk kelompok ekonomi mampu, atau keluarga memandang positif terhadap nilai pendidikan, namun mereka termasuk kelompok keluarga berekonomi kurang mampu, akan memunculkan respon yang negative, berupa sikap pesimistis dan apatis terhadap program perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang digalakkan pemerintah, misalnya dengan tidak berpartisipasi bahkan mungkin dapat mempengaruhi atau menghalangi putera-puterinya atau keluarga lain untuk mengantarkan dan melanjutkan pendidikan putera-puteri mereka.

Kesimpulan

Berangkat dari pokok permasalahan penelitian yang dilakukan tentang respon masyarakat terhadap program perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang terfokus pada tingkat partisipasi dan kemampuan anak bertahan di sekolah, dapat disimpulkan bahwa

respon masyarakat terhadap program perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia tujuh sampai dengan 18 tahun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan sejak beberapa tahun terakhir, telah menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih positif, meskipun masih banyak yang belum memperoleh pendidikan hingga tingkat yang memadai, dan tingkat kemampuan bertahan di sekolah yang masih rendah, terutama pada tingkat SLTP dan SLTA. Hal tersebut sebagian besar disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga dan letak geografis pemukiman penduduk yang terpecah dalam bentuk perkampungan-perkampungan kecil, serta keterbatasan sarana dan prasarana transportasi. Hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki persepsi dan nilai budaya yang kurang kondusif bagi pembangunan sumber daya manusia melalui perluasan kesempatan memperoleh pendidikan.

Sebagai efek dari kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah, orang tua terpaksa menghentikan pendidikan anaknya dan menjadikan anak sebagai salah satu sumber tenaga kerja untuk mencari nafkah bagi kehidupan keluarga, dan sebagian yang lain menikahkan anak perempuannya pada usia muda. Dengan demikian, pembangun sekolah-sekolah dan pemberian bantuan pendidikan dalam bentuk pembebasan SPP, pemberian beasiswa dan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang digulirkan pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi dan daya tahan anak di sekolah sebagai bagian dari program peningkatan kualitas sumber daya manusia, hanya akan efektif pada masyarakat dengan tingkat kemampuan ekonomi yang memadai, bukan pada masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah. Karena dengan tingkat kemampuan ekonomi yang rendah, meskipun mereka dapat melanjutkan pendidikan anak-anaknya melalui berbagai program pemerintah, namun mereka tidak mampu

menghasilkan pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga karena keterbatasan jumlah tenaga kerja yang ada. Satu-satunya jalan untuk meningkatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga adalah dengan menjadikan anak sebagai tenaga kerja atau menikahkan anak perempuannya pada usia muda agar dapat mengurangi beban keluarga.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut maka untuk meningkatkan peran serta orang tua dalam meningkatkan angka partisipasi dan daya tahan anak di sekolah, pemerintah hendaknya lebih keras berusaha meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja dan melalui pelatihan-pelatihan keterampilan dalam berbagai bidang pekerjaan, karena persepsi dan respon masyarakat yang mulai berkembang ke arah yang lebih positif terhadap nilai pendidikan bagi anak dan generasi muda merupakan modal penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu terus dikembangkan-suburkan dengan memberikan informasi tentang kebijakan pembangunan pendidikan oleh pemerintah melalui berbagai media komunikasi dan dalam berbagai kesempatan, dengan memanfaatkan para akademisi dari berbagai bidang.

Oleh karena penelitian ini lebih melihat hubungan sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat dengan respon mereka terhadap program peningkatan partisipasi dalam pendidikan, maka untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap tentang berbagai variable yang mempengaruhi respon dan persepsi masyarakat disarankan kepada para penelitian lain dari berbagai bidang keahlian untuk melakukan penelitian yang lebih luas dan komprehensif, antara lain penelitian tentang variabel tingkat pendidikan orang tua, kebijakan pembangunan pendidikan yang diambil pemerintah, dan keterkaitan serta relevansi bidang pendidikan dengan lapangan kerja, dan lain-lain.

Bibliografi

- Albach, Philip G, *Comparative Education*, (New York: Macmillan Publishing Cq. Inc., 1982).
- Ali, Muhammad, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, (Surakarta: UNIS Press, 2009).
- Anwar, Chairil, *Islam dan Tangan Kemanusiaan Abad XXI*, (Yogyakarta: Pustaka Remaja, 2000).
- Bock, C. John, *Education and National Building in Malaysia; A Study of Institutional Effect in Thirty-four Schols*, (Stanfort University, 1970).
- Bowen, William, *Economic Aspects of Education; Industrial Relation Section*, (Princeton: Princeton University Press, 1964).
- Farrell Joseph P., *Educational Expansion and The Drive for Sosial Equality* dalam Albach Philip G, *Comparative Education*, (New York: Macmillan Publishing Cq. Inc., 1982).
- Karsidi, Ravik, *Sosiologi Pendidikan*, (Surakarta: UNS Press, 2007).
- Sadullah, Uyoh, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2004).
- Sairin, Syafri, *Perubahan Sosial Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Remaja, 2002).